

ABSTRAK

Pada tahun 2016, sektor pariwisata menduduki peringkat kedua setelah minyak sawit mentah dalam daftar penyumbang devisa bagi terbesar Indonesia dengan total USD 13,568 miliar. Di bawah pemerintahan Jokowi, pengembangan Desa Wisata telah menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Indonesia di sektor pariwisata. Namun, sebagian besar pengembangan Desa Wisata (desa yang menggabungkan konsep pariwisata pedesaan dan pariwisata berbasis masyarakat) masih terkonsentrasi di dua pulau utama di Indonesia yaitu Jawa dan Bali.

Studi ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Desa Wisata Sanggu, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, terutama di bawah implementasi UU Desa terbaru Nomor 6/2014. Hal ini bertujuan untuk memperkaya studi mengenai pengembangan Desa Wisata di Indonesia untuk mengatasi tantangan dan menciptakan peluang untuk perbaikan di masa depan, terutama di daerah-daerah di luar dua pulau besar tersebut diatas, dalam hal ini khususnya di Pulau Kalimantan. Mixed methods concurrent embedded design diterapkan dalam penelitian ini melalui survei kuesioner dari 68 rumah tangga dan wawancara (lima wawancara semi-terstruktur dan tiga wawancara non-terstruktur) dengan pihak terkait seperti pemerintah lokal / kabupaten, pemerintah desa, dan penduduk desa.

Hasilnya menunjukkan dua faktor kunci yang mempengaruhi perkembangan Desa Wisata Sanggu saat ini, yaitu kepemimpinan dan insentif. Temuan menunjukkan bahwa kepemimpinan yang lemah (baik di tingkat kabupaten dan pemerintah desa) dan kurangnya insentif dari pemerintah kabupaten (terutama dalam hal peningkatan pembangunan kapasitas baik pemerintah desa dan penduduk desa melalui bantuan teknis (pelatihan, bimbingan, dan pengawasan) dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata) yang disebabkan oleh keterbatasan dana sangat mempengaruhi kondisi perkembangan Desa Wisata Sanggu saat ini. Selain itu, dana untuk desa juga masih belum dimanfaatkan secara optimal di Desa Wisata Sanggu oleh Pemerintah Desa Sanggu.

Dengan mempertimbangkan hasil tersebut, pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan harus lebih memperhatikan peningkatan pembangunan Desa Wisata Sanggu melalui beberapa tindakan seperti memperkuat sinergi dengan Pemerintah Desa Sanggu, khususnya dalam konteks pemanfaatan dana untuk desa menjadi lebih efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Sanggu, meningkatkan pembangunan kapasitas/kemampuan pemerintah dan penduduk Desa Sanggu di sektor wisata, mengakomodasi keterlibatan masyarakat setempat, mengoptimalkan peran media sosial sebagai bagian dari alat promosi desa pariwisata Sanggu, dll.

Kata kunci: Desa Wisata Sanggu, UU Desa no. 6/2014, kepemimpinan, insentif, dana untuk desa, keterlibatan masyarakat lokal.

ABSTRACT

In 2016, the tourism sector was ranked second after crude palm oil in the list of Indonesia's largest contributors to foreign exchange with a total of USD 13.568 billion. Under Jokowi's administration, the development of the *Desa Wisata* or Tourism Village has become one of Indonesian Government's priority programs in the tourism sector. However, most of the development of the *Desa Wisata* (a village that combines the concepts of rural tourism and community-based tourism) is still concentrated in the two main islands of Java and Bali.

This study examines the factors that influence the current development of the *Desa Wisata Sanggu*, South Barito Regency, Central Kalimantan, particularly under the implementation of the New Village Law no. 6/2014. It aims to enrich studies regarding the development of *Desa Wisata* in Indonesia in order to tackle challenges and create opportunities for its future improvement, especially in areas outside those two major islands, in this case in Kalimantan Islands. Mixed methods using concurrent embedded design are applied in this study through questionnaires surveys of 68 households and interviews (five semi-structured interviews and three non-structured interviews) with the related parties such as the local/regency government, the village government, and the villagers.

The result indicates two key factors that shape the current condition of the *Desa Wisata Sanggu*—which are leadership and incentives. The findings indicate that weak leadership (both in regency and village government level) and lack of incentives from the regency government (especially in terms of improving the capacity building of both the village government and villagers through technical assistance (training, guidance, and supervision) in tourism development and management) due to limited funding have greatly affected the current underdeveloped condition of the *Desa Wisata Sanggu*. Funds for village also still not optimally utilized in *Desa Wisata Sanggu* by the Sanggu Village Government.

Considering the results, the governments, particularly the South Barito Regency Government should pay more attention to the improvement of the *Desa Wisata Sanggu's* development through several actions such as strengthening the synergy with the Sanggu Village Government, particularly in the context of the utilization of funds for village to become more effective and efficient in supporting Sanggu tourism village development, improving capacity building/skills of Sanggu Village Government and Sanggu villagers in tourism sector, accommodating local community involvement, improving tourism promotion strategy by utilizing the role of social media etc.

Keywords: *Desa Wisata Sanggu, Village Law no.6/2014, leadership, incentives, funds for village, local community involvement.*